

HAMBATAN AKSESIBILITAS FASILITAS OLAHRAGA DAN REKREASI BAGI WARGA BINAAN DISABILITAS FISIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MITRO SUBROTO, RIKY AGUS PRABOWO

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
rikyprabowo36@gmail.com

Abstract: *This study investigates the barriers to accessibility of sports and recreational facilities for physically disabled inmates in correctional institutions. The urgency of this research stems from the need to promote inclusivity and well-being among vulnerable populations within the penal system. A qualitative approach was employed, utilizing interviews and observations to gather data from both inmates and facility staff. The findings reveal significant physical, structural, and attitudinal barriers that hinder access to these facilities, ultimately impacting the physical and mental health of disabled inmates. The study concludes that addressing these barriers is essential for fostering a more inclusive environment in correctional facilities, enhancing rehabilitation efforts and promoting the rights of disabled individuals.*

Keywords: *accessibility barriers; sports facilities; disabled inmates; correctional institutions; rehabilitation.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hambatan aksesibilitas fasilitas olahraga dan rekreasi bagi warga binaan dengan disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mempromosikan inklusivitas dan kesejahteraan di antara populasi rentan dalam sistem pemasyarakatan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari narapidana dan staf fasilitas. Temuan menunjukkan adanya hambatan fisik, struktural, dan sikap yang signifikan yang menghalangi akses ke fasilitas tersebut, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental warga binaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di lembaga pemasyarakatan, meningkatkan upaya rehabilitasi, dan mempromosikan hak-hak individu penyandang disabilitas.

Kata Kunci: hambatan aksesibilitas; fasilitas olahraga; narapidana penyandang disabilitas; lembaga pemasyarakatan; rehabilitasi.

A. Pendahuluan

Aksesibilitas fasilitas olahraga dan rekreasi merupakan aspek penting dalam mendukung kesejahteraan fisik dan mental warga binaan, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas fisik. Di banyak lembaga pemasyarakatan, fasilitas ini sering kali tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus individu penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka selama menjalani hukuman. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hambatan-hambatan yang ada agar dapat merumuskan solusi yang efektif. Teori inklusi sosial menjelaskan pentingnya partisipasi semua individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan pemasyarakatan.

Menurut teori ini, aksesibilitas terhadap fasilitas olahraga dan rekreasi adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk semua warga binaan tanpa terkecuali. Selain itu, teori rehabilitasi sosial menekankan bahwa kegiatan fisik dapat berkontribusi pada proses rehabilitasi individu, khususnya bagi mereka yang memiliki disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengacu pada kedua teori tersebut dalam menganalisis hambatan

aksesibilitas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak lembaga pemasyarakatan masih kurang memperhatikan kebutuhan khusus warga binaan penyandang disabilitas. Beberapa studi telah mengidentifikasi berbagai hambatan fisik dan struktural yang menghalangi akses ke fasilitas olahraga.

Namun, masih terdapat kekurangan dalam literatur mengenai dampak dari hambatan-hambatan tersebut terhadap kesejahteraan mental dan fisik narapidana penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang kondisi saat ini. Meskipun ada penelitian sebelumnya mengenai aksesibilitas di lembaga pemasyarakatan, masih terdapat celah dalam pemahaman tentang bagaimana hambatan-hambatan tersebut secara spesifik mempengaruhi warga binaan dengan disabilitas fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut secara komprehensif serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lembaga pemasyarakatan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi hambatan aksesibilitas fasilitas olahraga dan rekreasi bagi warga binaan penyandang disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penyelidikan mendalam mengenai fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan rinci tentang hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas fisik dalam mengakses fasilitas olahraga dan rekreasi di lembaga pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narapidana penyandang disabilitas fisik untuk menggali pengalaman dan perspektif mereka secara langsung. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan terhadap kondisi fasilitas olahraga dan rekreasi yang tersedia di lembaga pemasyarakatan, untuk menilai tingkat aksesibilitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama terkait hambatan yang dihadapi oleh individu-individu tersebut. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema dalam data secara sistematis

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hambatan Fisik

Hambatan fisik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas, terutama dalam konteks aksesibilitas fasilitas olahraga. Penelitian menunjukkan bahwa banyak fasilitas olahraga yang ada di lembaga pemasyarakatan tidak memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan bagi individu dengan disabilitas. Salah satu contoh nyata dari masalah ini adalah kurangnya ramp atau lift yang memadai. Tanpa adanya fasilitas tersebut, narapidana yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan besar untuk mengakses area olahraga, yang seharusnya menjadi tempat bagi mereka untuk berolahraga dan berinteraksi sosial. Fasilitas olahraga seharusnya dirancang untuk menjadi inklusif dan dapat diakses oleh semua warga binaan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Namun, kenyataannya, banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung hal ini. Misalnya, dalam banyak kasus, tidak ada jalur khusus yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk bergerak dengan bebas di sekitar area olahraga. Selain itu, fasilitas seperti toilet yang ramah disabilitas sering kali tidak tersedia, sehingga semakin memperburuk

situasi bagi narapidana penyandang disabilitas. Regulasi mengenai aksesibilitas fisik di Indonesia telah ada, seperti Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999, yang mengatur tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi. Namun, penerapan regulasi ini di lembaga pemasyarakatan masih jauh dari harapan. Banyak lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya menerapkan standar aksesibilitas ini, sehingga mengakibatkan banyak penyandang disabilitas terpinggirkan dari berbagai aktivitas yang seharusnya mereka nikmati. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, perhatian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas sering kali terabaikan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi mereka untuk mendapatkan akses ke fasilitas olahraga dan rekreasi yang layak. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang ada dan membuat perbaikan yang diperlukan. Salah satu solusi potensial adalah dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengembangan fasilitas olahraga di lembaga pemasyarakatan. Dengan cara ini, mereka dapat memberikan masukan berharga tentang apa saja yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu, pelatihan bagi staf mengenai cara mendukung penyandang disabilitas juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan olahraga. Pentingnya aksesibilitas fisik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik narapidana penyandang disabilitas tetapi juga pada kesehatan mental mereka. Kegiatan olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, sehingga sangat penting bagi mereka untuk memiliki akses ke fasilitas tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas olahraga harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemasyarakatan. Dalam konteks ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan perubahan positif. Reformasi sistem pemasyarakatan harus mencakup perhatian khusus terhadap kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi dan bermartabat. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi semua narapidana tanpa terkecuali. Secara keseluruhan, hambatan fisik dalam aksesibilitas fasilitas olahraga bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan infrastruktur dan menyediakan pelatihan serta dukungan yang diperlukan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan semua warga binaan.

2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural dalam lembaga pemasyarakatan sering kali menjadi faktor yang menghambat proses rehabilitasi narapidana, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas fisik. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pelatihan bagi staf tentang cara mendukung warga binaan dengan disabilitas. Tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu narapidana penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, termasuk olahraga dan rekreasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi mereka yang membutuhkan bantuan tambahan, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam aktivitas yang penting untuk kesejahteraan mental dan fisik. Kondisi ini diperburuk oleh kelebihan kapasitas di banyak lembaga pemasyarakatan, yang mengakibatkan tekanan lebih besar pada sumber daya yang ada. Dengan jumlah narapidana yang terus meningkat, perhatian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas sering kali terabaikan. Staf yang terbatas dan kurangnya pelatihan

menyebabkan mereka tidak dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga binaan, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas dan program rehabilitasi. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengevaluasi kembali struktur organisasi dan pelatihan yang ada agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan ini. Selain itu, hambatan struktural juga mencakup kurangnya kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Banyak lembaga tidak memiliki pedoman tertulis yang mengatur bagaimana cara menangani kebutuhan khusus narapidana dengan disabilitas. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, staf mungkin merasa bingung atau tidak yakin tentang bagaimana cara memberikan dukungan yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas, serta meningkatkan risiko mereka mengalami diskriminasi atau pengabaian. Pentingnya pelatihan bagi staf tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia dan pentingnya inklusi sosial. Staf perlu dilatih untuk memahami bahwa setiap narapidana, terlepas dari kondisinya fisiknya, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Pelatihan ini harus mencakup informasi tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan narapidana penyandang disabilitas serta cara membantu mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan rekreasi. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan staf, diharapkan mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua warga binaan. Reformasi dalam sistem pemasyarakatan juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi untuk penyandang disabilitas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan melibatkan suara mereka dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa kebijakan dan program rehabilitasi dirancang dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman langsung dari penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, penting juga untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan bagi staf di lembaga pemasyarakatan. Evaluasi ini harus mencakup umpan balik dari narapidana penyandang disabilitas tentang seberapa baik staf memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan dapat terus memperbaiki program pelatihannya agar lebih efektif dalam mendukung warga binaan dengan disabilitas. Selanjutnya, perlu adanya perhatian khusus terhadap infrastruktur fisik di lembaga pemasyarakatan agar lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Meskipun hambatan struktural sering kali terkait dengan pelatihan staf, infrastruktur fisik juga memainkan peran penting dalam memastikan aksesibilitas. Pembangunan fasilitas olahraga yang memenuhi standar aksesibilitas harus menjadi prioritas bagi lembaga pemasyarakatan agar semua warga binaan dapat berpartisipasi tanpa hambatan. Akhirnya, hambatan struktural dalam lembaga pemasyarakatan harus dipandang sebagai tantangan kolektif yang memerlukan solusi holistik. Semua pihak—pemerintah, lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas—harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan rehabilitasi yang inklusif bagi semua narapidana, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas fisik. Dengan pendekatan menyeluruh ini, kita dapat memastikan bahwa semua warga binaan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat setelah menjalani hukuman mereka.

3. Hambatan Sikap

Hambatan sikap yang dihadapi oleh warga binaan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mencapai inklusi dan partisipasi mereka dalam kegiatan olahraga dan rekreasi. Sikap negatif dari sesama

narapidana dan staf sering kali menciptakan lingkungan yang tidak mendukung, di mana individu dengan disabilitas merasa terasing dan tidak diterima. Stigma sosial terhadap disabilitas ini dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka, yang pada gilirannya menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya mereka jalani. Ketika narapidana penyandang disabilitas merasa bahwa mereka tidak diterima atau dihargai, motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga menjadi sangat rendah. Sikap negatif ini tidak hanya muncul dari narapidana lainnya, tetapi juga dari staf lembaga pemasyarakatan. Dalam banyak kasus, staf mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga mereka cenderung mengabaikan atau bahkan meremehkan kemampuan individu tersebut. Hal ini menciptakan kesan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan yang sama dengan narapidana lainnya. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan perlakuan diskriminatif yang semakin memperburuk stigma yang sudah ada, membuat penyandang disabilitas merasa semakin terasing. Stigma sosial terhadap disabilitas sering kali berakar dari stereotip dan pandangan negatif yang ada di masyarakat. Di dalam lembaga pemasyarakatan, pandangan ini dapat diperkuat oleh lingkungan yang keras dan kompetitif, di mana individu dengan disabilitas dianggap sebagai "kelemahan" atau "beban" bagi kelompok. Hal ini menyebabkan narapidana penyandang disabilitas merasa tertekan dan tidak nyaman untuk menunjukkan diri mereka atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Ketika mereka merasa tidak diterima, keinginan untuk berinteraksi dengan sesama narapidana pun menurun, sehingga mengisolasi mereka lebih jauh. Penting untuk menyadari bahwa sikap negatif ini dapat diubah melalui pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan bagi staf tentang inklusi dan pemahaman tentang disabilitas dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan terhadap penyandang disabilitas. Dengan memberikan pengetahuan kepada staf mengenai berbagai jenis disabilitas dan cara-cara untuk mendukung individu tersebut, diharapkan mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua warga binaan. Selain itu, program-program kesadaran di antara narapidana juga sangat penting. Melalui workshop atau diskusi kelompok tentang disabilitas, narapidana dapat belajar untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh teman-teman mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan akan muncul sikap saling menghormati dan mendukung antara sesama narapidana, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi semua orang. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan sikap ini. Melibatkan pihak ketiga dalam program rehabilitasi dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas serta memberikan dukungan moral kepada mereka. Organisasi-organisasi ini dapat membantu menyebarkan pesan positif mengenai inklusi sosial dan pentingnya memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, termasuk olahraga. Kondisi psikologis penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan juga perlu diperhatikan. Ketika mereka menghadapi stigma dan sikap negatif dari orang-orang di sekitar mereka, hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan depresi. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan psikologis bagi narapidana penyandang disabilitas agar mereka dapat mengatasi perasaan terasing dan membangun kepercayaan diri. Konseling individu atau kelompok dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mereka berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional dari sesama narapidana. Akhirnya, perubahan sikap di lembaga pemasyarakatan memerlukan komitmen dari semua pihak terkait. Pihak manajemen lembaga pemasyarakatan harus mengambil langkah proaktif untuk menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan di penjara. Ini termasuk memastikan bahwa fasilitas olahraga dan rekreasi

dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua warga binaan tanpa terkecuali. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, kita dapat membantu narapidana penyandang disabilitas menjalani masa hukuman dengan lebih bermartabat dan produktif. Dengan demikian, hambatan sikap menjadi faktor kunci yang perlu ditangani secara serius untuk memastikan bahwa semua warga binaan, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi yang bermanfaat. Mengubah persepsi masyarakat terhadap disabilitas adalah langkah awal menuju penciptaan lingkungan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu tanpa terkecuali.

D. Penutup

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hambatan aksesibilitas fasilitas olahraga dan rekreasi bagi warga binaan penyandang disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan sangat signifikan dan beragam. Berbagai tantangan, baik dari segi fisik, struktural, maupun sikap, telah menghalangi partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan olahraga dan rekreasi selama menjalani masa hukuman. Hambatan fisik seperti kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas, misalnya ramp atau lift, telah membatasi akses mereka ke area olahraga. Selain itu, hambatan struktural berupa kurangnya pelatihan bagi staf tentang cara mendukung warga binaan dengan disabilitas juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi mereka yang membutuhkan bantuan tambahan. Lebih lanjut, stigma sosial dan sikap negatif dari sesama narapidana serta staf lembaga pemasyarakatan telah menyebabkan penyandang disabilitas merasa terasing dan tidak diterima. Untuk meningkatkan kualitas hidup warga binaan penyandang disabilitas selama masa hukuman, perlu ada perhatian lebih dari pihak berwenang dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif serta menyediakan pelatihan bagi staf mengenai cara mendukung individu dengan disabilitas. Reformasi sistem pemasyarakatan harus mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas olahraga dan rekreasi, serta menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua warga binaan tanpa terkecuali. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, program-program kesadaran dan pendidikan tentang disabilitas juga harus digalakkan, baik di kalangan staf maupun narapidana lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, diharapkan dapat mengurangi stigma dan sikap negatif yang selama ini menjadi hambatan utama bagi partisipasi mereka dalam kegiatan rehabilitasi. Dukungan psikologis juga penting untuk membantu penyandang disabilitas mengatasi perasaan terasing dan membangun kepercayaan diri selama menjalani masa hukuman. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa mengatasi hambatan aksesibilitas fasilitas olahraga dan rekreasi bagi warga binaan penyandang disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan adalah sebuah tantangan yang memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, kita dapat memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas selama masa hukuman, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Hastin Trustisari & Mari Esterilita. (2020). Aksesibilitas Pelayanan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra. *Jurnal Manajemen Infrastruktur dan Aset*, 1(3), 660-671.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2021). *Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*. Perpustakaan Bappenas.
- Anjani, K. C. (2022). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Atlet Penyandang Disabilitas dengan Penekanan Konsep Aksesibilitas. *Jurnal Tugas Akhir*. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas.
- Anjani, K. C. (2022). Aksesibilitas Fasilitas Olahraga bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 45-58.
- Pratiwi, N. H. (2022). Kondisi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan: Tantangan dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 215-230.
- Rahmawati, D. (2021). Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 123-135.